



Kuota Layanan EKTP Dibatasi 150 Per Hari

- Pemohon Adminduk Daring Membludak
- Disdukcapil Beri Pemohon Token



*Jadi memang kami batasi, untuk
KTP elektronik kuota 150 per
hari, dokumen pindah 25,
pindah datang 24, dan KK 60.
Supaya pelayanan kita juga opti-
mal, dan dokumen bisa diambil
hari itu juga.*

Bram Prasetyo
Kabid Pelayanan Pendataan Kependudukan
Disdukcapil Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta membatasi kuota layanan administrasi kependudukan (adminduk). Hal ini lantaran membludaknya permohonan masyarakat terkait layanan tersebut secara daring.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendataan Kependudukan Disdukcapil Kota Yogyakarta, Bram Prasetyo, mengatakan, pembatasan kuota layanan dikarenakan membludaknya permohonan masyarakat,

● ke halaman 15

PEMBATASAN JUMLAH

- Untuk KTP elektronik kuota 150 per hari.
- Dokumen pindah 25, pindah datang 24.
- Layanan KK 60 per hari.
- Dokumen bisa diambil hari itu juga.
- Pengiriman WA permohonan layanan dilakukan pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB.
- Setiap permohonan yang masuk (melalui WhatsApp) diberikan token.

Instansi	Nilai	Tindakan
.....	☐ N	ntuk C
.....	☐ P	ntuk C
.....	☐ N	impa

Kuota Layanan

● Sambungan Hal 9

sementara jumlah petugas yang melayani terbatas.

Dia menjelaskan, setiap harinya ada sekitar 500 permohonan kependudukan. Mulai dari cetak KTP, Kartu Keluarga, dokumen pindah dan lain-lain. "Jadi memang kami batasi, untuk KTP elektronik kuota 150 per hari, dokumen pindah 25, pindah datang 24, dan KK 60. Supaya pelayanan kita juga optimal, dan dokumen bisa diambil hari itu juga," katanya, Jumat (12/6).

Ia mengungkapkan terkait pembatasan tersebut, pihaknya memberikan token pada setiap permohonan. Jika sudah mendapat token, artinya kuota masih tersedia dan permohonan bisa diproses. Namun jika sudah melebihi kuota, maka pemohon akan mendapat pemberitahuan. Sehingga bisa melakukan pendaftaran keesokan harinya.

Pembatasan pelayanan kependudukan tersebut sempat membuat khawatir, sehingga pemohon datang langsung ke Disdukcapil Kota Yogyakarta. "Memang kemarin banyak yang datang ke Disdukcapil, takut tidak bisa dilayani. Padahal karena ada kuota per hari. Setiap permohonan yang

masuk (melalui WhatsApp), kami berikan token," ungkapnya.

"Ada juga yang mengajukan layanan di luar jam kerja, jadi ya tidak bisa kami layani. Malah ada yang mengajukan malam hari, ya tidak bisa kami layani. Prinsipnya hari ini mendaftar, kalau kuota masih langsung dilayani. Tidak bisa hari ini mendaftar untuk besok," sambungnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak berulang kali mengajukan permohonan. Sebab setiap mengajukan permohonan justru akan menjadi permohonan baru.

Dia meminta warga sabar menunggu balasan. Pengiriman WA permohonan layanan dilakukan pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB.

"Ada juga yang karena belum mendapat balasan kemudian mengirim permohonan terus. Jangan seperti itu, kan yang dipakai nanti permohonan terakhir. Misal pukul 08.00 ngirim, nanti ngirim lagi, yang dipakai yang terakhir, malah bisa tidak dapat kuota," ujarnya.

Pihaknya pun kini tengah berupaya menyempurnakan sistem pelayanan di Disdukcapil Kota Yogyakarta, agar masyarakat semakin mudah dalam mengajukan

permohonan. Selain itu juga memberikan kepastian waktu yang lebih baik bagi pemohon.

Dukungan

Pembatasan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta mendapat dukungan dari Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Chandra Putra.

Chandra mengatakan secara prinsip pembatasan layanan tidak menyalahi aturan. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, protokol kesehatan wajib diterapkan, seperti social distancing. Namun yang menjadi catatan adalah sosialisasi yang kurang masif, sehingga masyarakat masih bingung.

"Secara prinsip tidak masalah, kami mendukung adanya pembatasan itu, karena memang ada WFH (work from home), petugas juga terbatas. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika sosialisasi jam pelayanan ini kurang masif," katanya kepada Tribun Jogja.

"Masyarakat mengira jam pelayanan online itu dimulai pada 07.30 sampai 15.30. Padahal pelayanan online hanya dilayani pukul 08.00 sampai pukul 11.00. Nah inilah yang kemudian membuat masyarakat bingung. Makanya sosialisasi yang masif perlu dilakukan," sambungnya.

Secara performa pelayanan, ia menilai pelayanan Disdukcapil Kota Yogyakarta sangat cepat.

"Kemarin saya mencoba sendiri. Ada warga yang tidak bisa mendaftar. Kemudian saya coba pakai nomor saya. Saya daftar pukul 08.30, jam 12.00 sudah jadi. Ini kan bagus. Tetapi memang sosialisasi ini harus dilakukan. Supaya masyarakat tidak bingung," lanjutnya.

Menurutnya, Disdukcapil Kota Yogyakarta bisa menggandeng Diskominfo Kota Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi melalui Jogja Smart Service (JSS). Tak hanya itu, kelurahan dan kecamatan pun harapannya juga bisa ikut mensosialisasikan terkait pelayanan tersebut.

Ia berharap pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tetap berjalan baik, meskipun di tengah pandemi. Chandra juga meminta masyarakat memahami adanya pembatasan layanan, sebab tujuan pembatasan tersebut adalah agar mengurangi penyebaran Covid-19.

"Layanan harus tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19, tetapi protokol kesehatan juga harus tetap jalan. Jangan sampai pelayanan berkurang," tutupnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005